

Kontrol Lensa Pelanggan Re-Branding: Kontrol Konstruksi Real-time yang Dipersonalisasi, Proaktif, Bertujuan, dan Penuh Warna

Hefri Yodiansyah ^{*1}, Hari Jummaulana ²

^{1,2} STISIP Persada Bunda, Indonesia.

*E-mail: hefriyodiansyahth@gmail.com¹, jummaulanahari@gmail.com²

Abstract

This paper presents an analysis of the Expanded Public Works Program (EPWP), one of the 'Driven Controls' Re-Branding Customer key policy initiatives intended to ease the burden of poverty or unemployment on the poor and unskilled. Historically, such programs have been used as assistance during short-term crises. Lately, many 'Driven Controls' Customers have adopted it for long-term structural challenges. This program study in the G-20 government is intended to protect women and youth. This paper uses a mixed methodological approach to determine the active participation of women and youth in EPWP and their opportunities to transition to the labour marketplaces. This study also solicits the views of EPWP participants (see also, active and former) and officials to obtain information that is not included in the program's official report. Analytical procedures involve document analysis, focusing on EPWP reports from phases One (1) to Three (3) of the programs. This study proposes two propositions: the need for public-private partnerships to address the challenges of unemployment in the country because independent policies for the government or marketplace are inadequate; new program design that separates job seekers from social protection beneficiaries. In its current form, the EPWP is designed as a grassroots poverty trap.

Keywords: *Expanded Public Relation Programmer, Public Employment, Issue Public, Unemployment, Sexual.*

1. PENDAHULUAN

Tantangan 'Driven Controls' Re-Branding Customers' temuan penelitian memiliki identifikasi studi masalah silsilah yang panjang, sejak era apartheid itu pertama kali diklasifikasikan menurut garis rasial, dengan ras yang sebelumnya kurang beruntung menanggung bebannya, dan akhirnya ini wanita dan remaja semakin merasakan kampanye pemasaran yang berdampak pada peluang pasar dominan (Rahardjo & Si, n.d.). Seperti negara-negara lainnya, negara berkembang ini

berjuang dengan tingkat pendapatan yang tinggi di antara kaum muda dan kelompok rentan lainnya (Faith, B.; Flynn, J., n.d.). Secara umum, negara secara konsisten mencatat tren pendapatan yang terus meningkat. Pada kuartal keempat tahun 2021, negara ini anggaran belanja negara, yang berarti juta orang, meskipun berdasarkan definisi memanfaatkan pendapatan yang rendah rentan terhadap penyalahgunaan belanja (Lee et al., 2021). Sebuah Pembelanjaan misalnya yang dilakukan kaum tata kelola sistem keuangan adalah yang lama, dengan jumlah rasio belanja yang baru dibandingkan dengan komunitas laki-laki dan perempuan, sementara dilihat dari rasio pendapatan kaum muda masing-masing untuk kelompok usia 15-24 tahun dan 25-34 tahun dengan mencapai 66,5% dan 43,8% pada kuartal tiga (3) tahun 2021. Tingkat pengangguran negara itu juga mendominasi di antara negara-negara anggota negara berkembang oleh data Customs Union (SACU) di beberapa negara berkembang.

Misalnya dapat dilihat pada negara Asia dan Afrika Selatan sebagai acuan negara berkembang. Pada tahun 2019 lalu, pendapatan pekerja mereka perempuan masih tertinggi sebesar 30,5%, sama Afrika Selatan dan Lesotho peringkat kedua tertinggi sebesar 28,13%, Kerajaan Eswatini berada di urutan ketiga sebesar 23,9%, Botswana keempat sebesar 20,51% dan Namibia peringkat kelima sebesar 18,53%. Alhasil, peringkat mengenai level pendapatan yang diperoleh negara lainnya. Sementara pengangguran kaum muda juga dikatakan tertinggi di antara negara-negara anggota. Pendapatan kaum muda juga dikatakan tertinggi di antara alasan pekerjaan lainnya yang menjelaskan tantangan komunitas ini, seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi yang buruk dan restrukturisasi ekonomi yang telah menyebabkan pergeseran cepat menuju tenaga kerja terampil, membuat banyak orang tidak terampil keluar dari pasar tenaga kerja (Th et al., 2022). Sedangkan sektor pertanian dan pertambangan yang merupakan penyerap utama tenaga kerja non-skill mengalami penurunan yang cukup parah sedangkan sektor-sektor yang meliputi jasa, keuangan, bisnis, grosir dan eceran, yang membutuhkan keterampilan khusus, tumbuh secara signifikan.

Tantangan pengangguran post-struktural dan rintangan kekurangan masih ada keterampilan diperkuat oleh persyaratan keterampilan dari Revolusi Industri Keempat (4IR) baru-baru ini. Telah secara signifikan mengubah gaya orang hidup dan bingkai bekerja, dengan demikian mendorong kaum muda ke garis depan pembangunan pada perilaku industri budaya, akan tetapi telah terjadi pergeseran baru juga dalam keterampilan yang dibutuhkan. Bersemangat untuk menciptakan Negara Afrika Selatan yang inklusif, pemerintah memprakarsai beberapa intervensi kebijakan sejak akhir era apartheid, yang semuanya memiliki target khusus untuk mengatasi tantangan pengangguran di negara mereka tersebut. Dalam versinya yang beragam, intervensi ini mengistimewakan kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan serta pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja. Dalam konteks inilah pemerintah memperkenalkan Program Ketenagakerjaan Publik (PEP) yang dikenal sebagai Program Pekerjaan Umum yang Diperluas (EPWP) pada tahun 2004 sebagai strategi bantuan jangka pendek hingga menengah untuk mengatasi tantangan pengangguran negara. Asal usul program ini adalah pada pertengahan 1990-an ketika pertama kali dilaksanakan sebagai Program Pekerjaan Umum Berbasis Masyarakat (CBPWP) yang menggunakan pendekatan padat karya untuk membangun aset masyarakat dan kapasitas lokal, sehingga menciptakan lapangan kerja jangka Panjang untuk melindungi miskin dan menganggur. EPWP adalah program bertahap lima (5) tahunan yang selaras dengan kebijakan pemerintah G-20 yang lebih luas yang awalnya terkait dengan Program Rekonstruksi dan Pembangunan (RDP) tahun 1994 dan saat ini dengan cetak biru pembangunan pemerintah saat ini, Rencana Pembangunan Nasional (lihat saja Rencana Pembangunan Nasional) yang diadopsi pada tahun 2012. Tujuan program sekarang difokuskan pada perlindungan sosial, penciptaan aset dan kesempatan kerja bagi orang miskin dan tidak terampil kerja dengan penekanan lebih ditempatkan pada pekerjaan kelompok rentan fikulatif pasif. Pengangguran negara berkembang terutama untuk perempuan dan pemuda mengkhawatirkan oleh pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini terlepas dari upaya pemerintah untuk mengekangnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana EPWP menanggapi tantangan ini.

Dalam studi masalah ini, makalah ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana program tersebut mengatasi masalah komunitas dalam post-struktural negara di antara kategori populasi wanita dan pemuda di komunitas masih dianggap post-apartheid penciptaan aset dan kesempatan kerja bagi orang miskin dan tidak terampil [21] dengan penekanan kewirausahaan lebih ditempatkan peluang pasar pada pekerjaan kelompok berbeda rentan. Kesempatan negara berbeda terutama untuk perempuan dan pemuda mengkhawatirkan pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat dan pemangku kepentingan globalisasi. Ini keputusan terlepas dari upaya pemerintah G-20 untuk mengekangnya mengatasi penganguran dan pola alur kerja procedural administrasi berbeda. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana EPWP menanggapi tantangan gaya masyarakat yang rentan sosial dalam kebutuhan baru ini. Dalam metode pendekatan ini, makalah ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana program tersebut mengatasi masalah pengangguran post-struktural negara di antara kategori dengan jumlah populasi yang tidak ditentukan secara sampel acak wanita dan pemuda kesempatan post-apartheid dalam penciptaan lapangan aset dan kesempatan kerja bagi orang miskin dan tidak terampil kewirausahaan [21] dengan penekanan usaha liar lebih ditempatkan pada pekerjaan kelompok rentan tersebut. Misalnya Negara berkembang terutama untuk perempuan dan pemuda mengkhawatirkan pemerintah, masyarakat sipil, masyarakat dan pemangku kepentingan sosial lainnya. Ini kebijakan sosial terlepas dari upaya pemerintah program untuk kebutuhan yang mengekangnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana EPWP menanggapi tantangan gaya hidup masyarakat terhadap alur kerja ini. Alhasil, makalah ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana program tersebut mengatasi masalah pendapatan struktural negara di antara kategori populasi wanita dan pemuda di negara post-apartheid yang terstruktur.

Artikel ini bertujuan perspektif struktur untuk menganalisis bagaimana EPWP menanggapi tantangan ini. Dalam mendidik masyarakat bekerja ini, makalah ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana program tersebut mengatasi masalah pengangguran struktural negara di antara kategori populasi wanita dan pemuda seringkali pada post-apartheid.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana EPWP menanggapi tantangan dan rintangan ini. Dalam kebutuhan ini, makalah ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tentang bagaimana program mengatasi masalah pengangguran dalam struktural negara di antara kategori populasi wanita dan pemuda negara berkembang aspek post-apartheid. Berdasarkan 'model Keynesian,' Program Pekerjaan Umum (PPU) memiliki silsilah panjang sebagai kebijakan krisis-ketenagakerjaan jangka pendek. Mereka telah dipekerjakan oleh negara maju dan berkembang dalam menanggapi sejumlah krisis. Persamaan dalam dekade periode Panjang kembali ke abad ke-19, ketika India (kemudian dikenal sebagai British India) menanggapi kekeringan berturut-turut di tahun 1830-an, 1870-an dan 1890-an dimana melalui metode padat karya, 'PPU' digunakan untuk melindungi korban kelaparaan bahkan sebagainya. Kemudian, negara-negara seperti Amerika Serikat (AS) selama Depresi Besar pada tahun 1934, Jerman Timur selama krisis ekonomi setelah jatuhnya Tembok Berlin, Argentina selama krisis ekonomi tahun 1998 hingga 2002 dan Ethiopia juga telah menggunakan program ini. Senada dengan itu, Afrika Selatan juga memperkenalkan EPWP pada tahun 2004, menargetkan orang miskin dan tidak terampil untuk memberikan bantuan pekerjaan sementara kepada para penganggur sambil melatih kembali mereka yang tidak terampil atau semi-terampil.

Namun, secara global program semacam itu tidak diakui sebagai kebijakan peluang pasar tenaga kerja aktif karena, pada dasarnya, program tersebut dirancang untuk memberikan bantuan pekerjaan sementara. Akhir-akhir ini, beberapa negara telah secara inovatif kreatif menggunakan program-program ini untuk mengatasi tantangan jangka panjang sehingga mengubah filosofi yang mendasari bantuan krisis jangka pendek, membawa dinamika perpektif baru ke arena peluang pasar tenaga kerja. Inilah yang terjadi dengan EPWP yang telah menjadi perspektif alternatif terbaik berikutnya bagi para pendapatan di negara berkembang (Dankan Gowda et al., 2022). Hal ini menempatkan tanggung jawab yang signifikan pada program tersebut, bukan sebagai program pelengkap ketenagakerjaan (Erozkan, 2013; Thapliyal & Dimri, 2022) pula.

Artikel ini (Th et al., 2022) menggunakan metodologi campuran dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, dilengkapi dengan data sekunder tentang EPWP dan laporan peluang pasar tenaga kerja secara umum. Melalui data analisis pengalaman hidup dari peserta EPWP aktif dan keanggotaan masih rentan tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyumbangkan studi literatur tentang bagaimana 'PPU' dapat digunakan secara efektif oleh negara-negara untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Secara khusus, di negara berkembang di mana tantangan tidak berorientasi pada krisis jangka pendek tetapi telah menjadi bagian kebutuhan yang Panjang dari kehidupan sehari-hari banyak warga negara yang terbiasa dengan bias yang signifikan terhadap kelompok berbeda rentan seperti perempuan dan pemuda. Artikel ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian pertama meliputi latar belakang penelitian dan pertanyaan penelitian. Bagian kedua membahas tentang bahan dan metode survei yang digunakan data dalam Teknik pengumpulan data. Pembahasan mengikuti bagian keempat dan kemudian bagian lima (5) menyimpulkan penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Studi masalah sosial itu studi kompleks, demikian juga tantangan pekerjaan dan pendapatan di negara berkembang. Sementara beberapa sumber berpendapat bahwa perempuan dan pemuda telah menjadi pusat perhatian dalam kepemimpinan, ekonomi dan peluang pasar tenaga kerja, ada bukti kuat sebaliknya. Artikel ini mengadopsi metode pendekatan yang kuat untuk pemahaman lengkap tentang EPWP dan hubungannya dengan perlindungan kelompok rentan di negara ini. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam cara data dihasilkan dan dianalisis model. Wawancara terstruktur dan semi terstruktur dikumpulkan dari 224 (aktif dan mantan peserta EPWP) di partisipan aktif serta 30 pejabat EPWP. Kemudian terdiri dari data analisis dokumen dan data kuantitatif dalam bentuk statistik terdokumentasi.

Data dianalisis menggunakan grafik dan tabel serta penyajian tematik. Data kuantitatif pertama kali dikumpulkan dari lapangan melalui survei dengan menggunakan kuesioner

terstruktur. Beberapa data kualitatif dikumpulkan dari sumber sekunder seperti EPWP, pasar tenaga kerja dan laporan media. Dari data ini, masalah utama diidentifikasi.

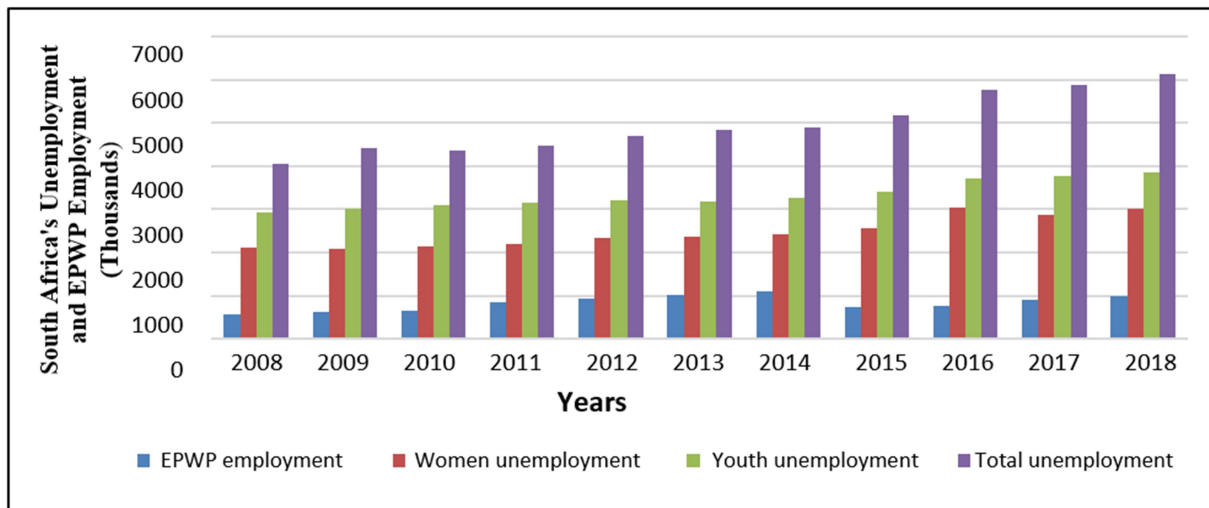
3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Negara berkembang sebagai mimpi dari pengetahuan secara layak bermimpi 'otopian' yang menderita pendapatan struktural, yang berarti mereka dihasilkan yang tidak memiliki keterampilan membutuhkan perspektif alternatif pekerjaan. Pemerintah terus menekankan penciptaan lapangan kerja EPWP sebagai pelengkap upaya lembaga penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja oleh sektor swasta. Program ini dianggap dan dipahami sebagai bantuan sementara terhadap tantangan perkembangan G-20. Banyak pertanyaan mengenai sejauhmana program telah berhasil memberikan sudut pandang ini terutama yang dibutuhkan negara tersebut.

3.1 Tenaga kerja EPWP terlalu kecil untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan negara

Peluang kerja EPWP sangat rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pekerjaan di negara berkembang tersebut. Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, negara ini memiliki lebih dari 4 juta orang yang menganggur, dan hanya dalam waktu 10 tahun, pengangguran melonjak sebesar 50% menjadi 6,1 juta orang pada tahun 2018. Pada latar belakang sebelumnya secara rasional frekuensi pekerjaan mengandung masalah studi pada negara afrika selatan gambar sebagai berikut:

Gambar 1.1. Frekuensi Rasional dan Pekerjaan EPWP [36-37].



Angka-angka ini mencerminkan definisi pekerjaan istilah pengangguran secara resmi, artinya dalam definisi luas, jumlah pengangguran secara substansial jauh lebih banyak daripada yang tercermin. Seperti yang ditunjukkan di atas, EPWP menciptakan 570.019 pekerjaan pada tahun 2008 dibandingkan dengan lebih dari 4 juta orang yang membutuhkan pekerjaan pada tahun yang sama. Tingkat pekerjaan EPWP berkisar antara 14% dan 22% dari pengangguran selama tiga (3) tahap pelaksanaannya. Target 4,5 juta pekerjaan untuk Fase Dua (2) atau target 6 juta pekerjaan untuk Fase Tiga (3), yang untuk periode lima tahun penuh dari setiap fase (Departemen Pekerjaan Umum, 2019) setara dengan semua pekerjaan yang dibutuhkan di dalam negeri setiap tahunnya. Administrasi proyek yang buruk diidentifikasi sebagai tantangan yang mengarah pada penciptaan kesempatan kerja yang buruk pada program. Dari pejabat EPWP yang mengikuti survei, 41% mengatakan bahwa pekerjaan diciptakan tetapi tidak dilaporkan karena administrasi yang buruk. Pekerjaan yang diciptakan dilaporkan pada sistem pelaporan EPWP. Sebuah laporan tentang EPWP oleh South African Cities Network menyatakan bahwa, "...perubahan pada persyaratan sistem pelaporan yang dibuat pada 2015/16 menyebabkan

data yang berkaitan dengan proyek menjadi tidak sesuai sehingga proyek dan peluang kerja yang dibuat tidak dapat dilaporkan". Akibatnya, beberapa data dibuang karena tidak dapat diandalkan sehingga kehilangan jejak peluang kerja yang tercipta. Alasan lain yang diberikan untuk ini adalah kurangnya kapasitas dalam pemerintahan. Ini keputusan diskusi mereka pelajari adalah pandang sudut dari salah satu pejabat EPWP yang mengatakan:

Misalnya perspektif alternatif pada Program Pemerintah G-20 tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakan proyek infrastruktur, beberapa kontrol unit pekerjaan adalah kontrol bingkai kerja yang tidak memiliki pengetahuan berbeda di bidang konstruksi, sehingga beberapa proyek tidak dapat dilaksanakan jika ada perbedaan dari level kebutuhannya.

Kesenjangan sosial antara jumlah pekerjaan yang diciptakan oleh EPWP dan tingkat pengangguran terlalu lebar; karenanya, ada seruan untuk memperluas program guna menyerap lebih banyak pengangguran (PARKS, 1977; Pogorzelski, 2018; Trent, 2009). Kebutuhan untuk memperluas program juga bergema dari dalam program G-20 dengan salah satu pejabat EPWP menekankannya dengan mengatakan:

Ada kebutuhan untuk menyusun kerangka kebijakan di parlemen yang mewajibkan proyek sektor publik untuk memiliki komponen EPWP akurasi secara aktif.

Diusulkan dalam debat parlemen pada 14 Februari 2019 bahwa program tersebut harus meluncurkan mungkin proyek infrastruktur besar yang kemudian kampanye dapat menyerap pengangguran. Ini tidak mengherankan karena masalah pengangguran telah menjadi masalah kebijakan utama, dan pemerintah kesulitan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Namun, ada beberapa langkah penghematan yang dirancang untuk mengurangi beban fiskal negara tahun anggaran 2014/15 dengan salah satu konsekuensinya adalah pengurangan belanja sosial dan pemotongan alokasi hibah infrastruktur. Hibah infrastruktur adalah dana yang digunakan badan publik untuk menciptakan lapangan kerja

EPWP. Pengurangan hibah ini melumpuhkan potensi perluasan program. Jika program ingin diperluas, program tersebut harus dilakukan dalam anggaran fiskal pemerintah yang terbatas. Hal ini didukung oleh salah satu pejabat EPWP yang mengatakan:

Anggaran kami dipotong dan peluang kerja EPWP tidak direvisi sesuai dengan pemotongan anggaran. Kami akhirnya memprioritaskan ulang proyek dan pada akhirnya orang yang seharusnya kami pekerjakan akhirnya tidak mendapatkan kesempatan kebutuhan.

Hal ini didukung oleh 17,6% pejabat EPWP yang mengikuti metode survei tersebut yang mengatakan bahwa pemotongan anggaran merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja oleh badan publik. Di sisi lain, para penganggur merasakan tekanan untuk tetap bekerja pada program pemerintah sekarang tersebut, karena sulit mendapatkan pekerjaan di pasar tempat yang ditentukan dan sebagai lain. Misalnya salah satu peserta EPWP, sebuah negara di Nolwazi, perempuan berusia 31 tahun dari desa Gamothibi, yang seumur hidupnya belum pernah memiliki pekerjaan tetap dan sedang bekerja di kebun masyarakat bersama delapan orang lainnya dari desanya memandang EPWP sebagai sambutan bantuan dari keadaan penganggurannya.

Dia mengatakan bahwa dia memiliki sertifikat matrik yang tidak lengkap dan EPWP adalah satu-satunya pemberi kerja di desanya. Namun, dia mengeluhkan bahwa peluang EPWP terbatas karena hanya beberapa orang yang dapat mengerjakan program tersebut pada waktu tertentu. Ketika orang lain melamar melalui kantor Lembaga Nirlaba (NPO) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program di desanya di Kuruman, mereka biasanya diberitahu bahwa anggaran tidak cukup untuk menerima peserta baru.

Mereka disarankan menunggu tahun depan karena kemungkinan besar anggaran akan ditambah. Dia mengatakan ada dua perempuan yang bergabung dengan kelompoknya pada tahun 2018 setelah menunggu selama tiga tahun untuk dimasukkan ke dalam peserta

EPWP. Sementara mereka menunggu kenaikan anggaran yang diklaim, mereka tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada 'skrops' (pekerjaan paruh waktu) di desa tersebut. Dia menemukan situasi ini sangat frustrasi. Pandangan umum ini dibagikan sudut pandang oleh seorang pejabat EPWP yang mengatakan:

Program-program seperti EPWP adalah kunci untuk memenuhi janji pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, dan ini dapat dilakukan melalui peningkatan dukungan anggaran untuk memfasilitasi perluasan lapangan pekerjaan sektor dalam perspektif alternatif dalam metode survai.

Peluang kerja peluang pasar ini dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kendala anggaran menghambat hasil program yang dimaksudkan untuk melindungi kaum miskin dan pengangguran.

3.2 Proyek EPWP menawarkan pilihan pekerjaan yang terbatas

Tidak banyak kesempatan kerja sehingga EPWP menjadi apa yang disebut sebagai 'pemberi kerja terakhir.' Yang tidak terampil atau semi-terampil harus mencari peluang EPWP. Wanita menghargai pekerjaan EPWP karena pilihan yang terbatas. Misalnya, di Keneilwe, wanita berusia 38 tahun dari Greenpoint Township di Kimberley yang saat ini tinggal di rumah RDP bersama tiga anak, orang tua, dan empat saudara kandungnya merasakan dampak dari tingginya tingkat pengangguran di negara tersebut. Dia menghargai bekerja untuk program tersebut karena tidak ada pilihan lain untuknya. Dia berkata:

Sulit untuk mencari pekerjaan terutama di sini di Kimberley... ketika mereka membangun Diamond Pavilion Mall kami berharap kami akan mendapatkan pekerjaan di sana sebagai asisten toko tetapi beberapa dari kami gagal. Kebanyakan anak perempuan di daerah saya yang putus sekolah memiliki dua anak atau lebih dan akhirnya melakukan hal 'vat en sit' (artinya pasangan yang belum menikah yang tinggal bersama). Hidup tidak normal di sini. Kami sangat membutuhkan pekerjaan lama menjadi pekerjaan komuditas unggul.

Keneilwe tidak memiliki keahlian formal dan satu-satunya pengalaman kerja yang dia miliki adalah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah hotel di Kimberley dengan kontrak jangka pendek. Dia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap dalam hidupnya dan membutuhkan pekerjaan tetap. Dia telah bergabung dengan EPWP sekitar lima tahun sebelumnya dan mengerjakan proyek pengaspalan jalan di Jalan TOL. Dia berkata:

Saya senang ketika Wakil Presiden (maksudnya Pak Ramaphosa yang sekarang menjadi Presiden negara) mengunjungi proyek kami pada tahun 2015, saya pikir kami akan mendapatkan pekerjaan tetap setelah melihat pekerjaan baik yang telah kami lakukan. Itu tidak terjadi karena kami masih mengandalkan EPWP untuk bekerja.

Pada saat wawancara, Keneilwe sedang mengerjakan proyek pembersihan jalan di Kimberley. Serupa dengan situasi Keinelwe, kaum muda yang gagal di pasar tenaga kerja memilih program pekerjaan. Misalnya, Kealagile, laki-laki berusia 31 tahun dari Desa Glenred yang lulus matrikulasi pada tahun 2008 tetapi gagal mendapatkan mata pelajaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan kemudian pergi ke peternakan di Provinsi Western Cape untuk mencari pekerjaan, bersyukur telah bekerja pada program. Karena upah sangat rendah di pertanian dan pekerjaannya musiman, dia melaporkan bahwa dia merasa hidup tidak tertahankan dan oleh karena itu memutuskan untuk pulang ke rumah. Sayangnya, di desanya tidak ada pekerjaan peluang simpan untuk proyek EPWP. Dia berkata:

pada tahun 2012 saya memutuskan untuk pulang kampung dan saya dipekerjakan sebagai supervisor di proyek EPWP dimana saya mendapatkan penghasilan Rp. 2.500.000 per bulan.

Menurut Kealagile, pengangguran merupakan tantangan di desanya dan mereka yang tidak terampil mengandalkan pekerjaan EPWP. Lapangan pekerjaan yang ada di desanya hanya pekerjaan pemerintah di bidang pengajaran, penyuluhan pertanian, keperawatan atau di kepolisian di Desa Bothitong yang jaraknya sekitar 15 km. Yang

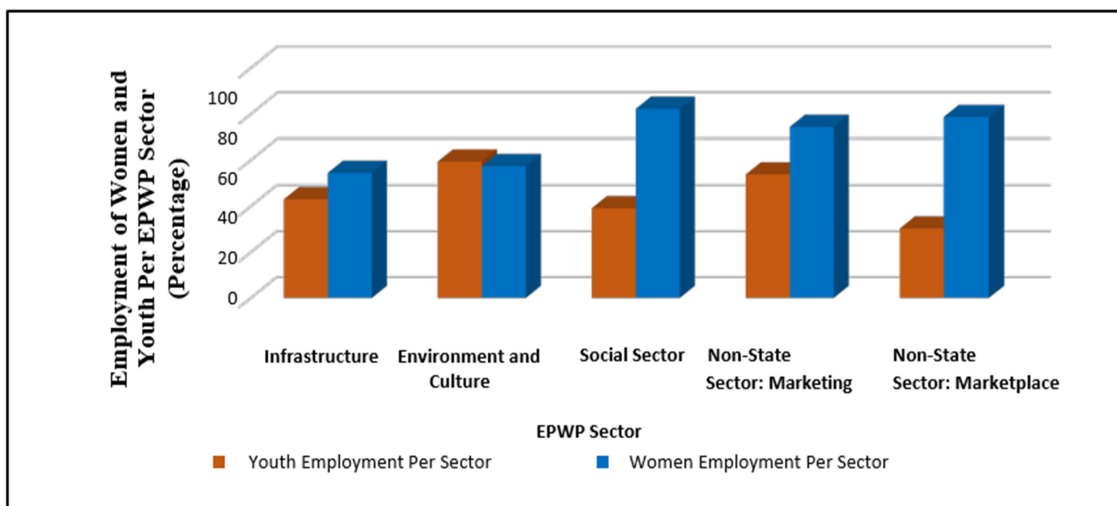
beruntung mendapatkan pekerjaan di Kuruman, sekitar 70 km dari rumahnya. Ketenagakerjaan EPWP diperlukan di bidang-bidang ini untuk melindungi orang miskin dan pengangguran dari kesulitan pengangguran.

3.3 Beberapa sub-program EPWP mempekerjakan kaum muda lebih baik daripada yang lain

Program tersebut telah berhasil menciptakan sub-program yang mampu menyerap perempuan, dengan sektor Sosial mempekerjakan perempuan sebesar 82%, sektor Non-negara mempekerjakan 78% wanita dalam CWP, dan NPO mempekerjakan 74% wanita seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Satu EPWP yang memuji program untuk memberikan kesempatan kerja bagi perempuan mengatakan:

Pengenalan sektor non-negara pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan dalam pekerjaan perempuan dalam program tersebut. Meningkatnya sub-program yang berpihak pada perempuan seperti nutrisi sekolah, perawatan berbasis rumah dan beberapa sub-program dari NPO dan CWP telah mendorong pertumbuhan ini.

Gambar 1.2. EPWN pekerjaan Perempuan dan Pemuda per Sektor pada 2019.



Di sisi lain, program tersebut telah berjuang untuk menarik perhatian kaum muda terhadap program-programnya. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya partisipasi kaum muda meskipun tingkat penganggurannya tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 daya serap pemuda berkisar antara 30% sampai 59% di 2019. Kalangan muda memandang pekerjaan EPWP sebagai sesuatu yang merendahkan menurut pengamatan Mercy. Mercy adalah seorang wanita berusia 34 tahun yang menjadi supervisor di proyek EPWP di Veregenoerg Township. Mercy berkata:

mereka (mengacu pada pemuda) menganggapnya sebagai pekerjaan orang tua... yang kami mulai dengan mengundurkan diri dan mencari pekerjaan sebagainya.

EPWP menyediakan lapangan kerja tetapi beberapa anak muda merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan pada program tersebut tidak cukup layak untuk mereka. Namun, salah satu alasan yang dikemukakan oleh pejabat EPWP yang mengikuti wawancara adalah bahwa dalam beberapa kasus, anak muda tidak memenuhi persyaratan minimum untuk sub-program tertentu. Para pejabat EPWP mengatakan: “tidak mudah mendapatkan pelajar dengan Matematika dan Sains.” Ini keputusan adalah salah satu persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam sub-program NYS, dan tanpa kredensial tersebut, maka Nasional Sub-program Youth Service (NYS) tidak dapat membantu.

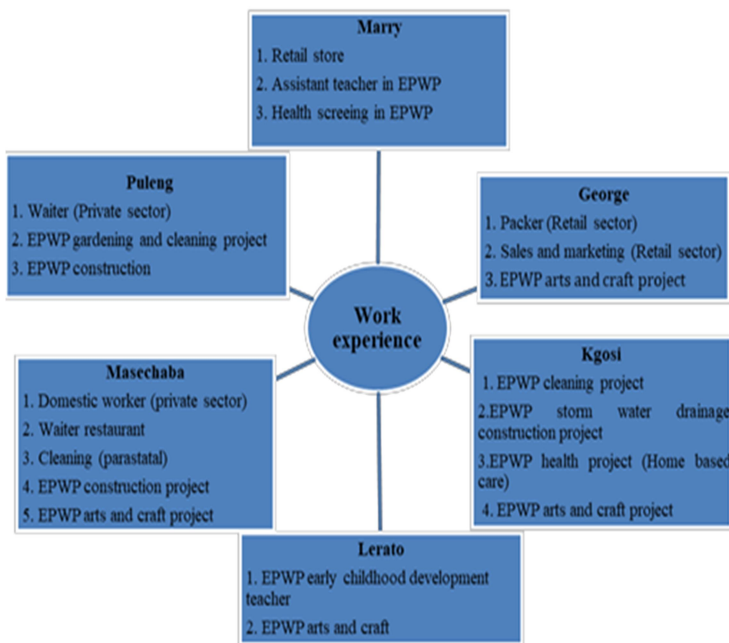
3.4 EPWP menghasilkan kualitas tenaga kerja yang buruk

Orang-orang yang bekerja di proyek EPWP diharapkan menemukan jalan mereka ke pasar tenaga kerja formal. Faktor pembeda pekerjaan EPWP adalah berbasis proyek dan sebagian besar proyek berdurasi jangka pendek. Selain itu, tingkat upaya yang diperlukan di berbagai proyek berbeda-beda, dengan beberapa orang memiliki beban kerja yang jauh lebih berat dibandingkan yang lain. Kualitas tenaga kerja ditentukan oleh waktu yang dihabiskan di tempat kerja, pengalaman kerja yang diperoleh dari proyek, kegiatan EPWP dan mobilitas dalam proyek. Kualitas tenaga kerja mempertimbangkan jenis pengalaman

kerja yang diperoleh peserta EPWP dari program ini, yang juga penting jika mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Para peserta EPWP dilatih sebagai tenaga kerja umum di semua bidang. Seorang pejabat EPWP berkata:

peserta EPWP kami melakukan segalanya. Kami memberi mereka tugas apa pun yang tersedia, yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan uang saku.

Data dari peserta EPWP menunjukkan kecenderungan tertentu dalam pengalaman kerja pekerja EPWP seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3. Mereka cenderung memiliki pengalaman kerja yang sangat beragam sehingga tidak ada pertumbuhan keterampilan yang terlihat dari masing-masing komponen perspektif kontrol sosial mereka yang dikontribusikan pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Responden yang dikutip Pengalaman Kerja baik dari EPWP

Responden yang dikutip pada Gambar 1.3 memiliki pengalaman kerja baik dari EPWP dan sektor swasta atau EPWP saja. Sebagian besar peserta EPWP memiliki pengalaman kerja di lebih dari satu sektor EPWP. Sulit untuk menggambar jalur karir, misalnya untuk Kgosi dari

Greenpoint Township layak seperti jalan tol, yang memiliki pengalaman kerja lebih dari

tiga tahun dari EPWP saja. Dalam tiga tahun yang dihabiskan Kgosi untuk EPWP, dia telah bekerja di keempat sektor program tersebut. Ketika dia mulai mengerjakan program ini berada di proyek Lingkungan dan Budaya yang bertanggung jawab untuk pembersihan jalan. Pada tahun yang sama, dia keluar dari proyek pembersihan untuk bergabung dengan sektor Infrastruktur, di mana dia terlibat dalam pembangunan misalnya drainase air hujan sebagai buruh umum. Ini adalah kontrak jangka pendek 6 bulan. Ketika kontrak ini berakhir, dia bergabung dengan proyek perawatan berbasis rumah di sektor Sosial tempat dia bekerja selama setahun. Dia kembali keluar untuk bergabung dengan proyek seni dan kerajinan di sektor agraris.

Oleh karena itu, Kgosi memiliki pengalaman kerja singkat dalam aktivitas yang tidak terkait. Riwayat pekerjaan Kgosi sangat merusak peluangnya untuk meyakinkan calon pemberi kerja yang melihat profilnya bahwa dia dapat melakukan pekerjaan tertentu karena dia tidak memiliki pengalaman luas di sektor atau industri tertentu.

Studi kasus serupa lainnya adalah Masechaba dari Roodepan Township yang memiliki lebih banyak pengalaman kerja lebih dari lima (5) tahun pernah bekerja di sektor swasta dan proyek EPWP. Dia telah bekerja sebagai pekerja rumah tangga di sektor swasta, pembersih di parastatal, pramusaji di restoran, terlibat dalam konstruksi di EPWP, dan sekarang bekerja untuk proyek seni dan kerajinan di EPWP. Tiga (3) pekerjaan pertama terkait, tetapi dia menemukan dirinya dalam proyek konstruksi serta proyek seni dan kerajinan ketika dia bergabung dengan program tersebut, mengambil arah karir yang sama sekali berbeda. Ini menempatkan Masechaba dalam dilema yang sama dengan Kgosi. Ini adalah kasus umum dari sebagian besar peserta EPWP, dengan beberapa telah bekerja di hampir semua sektor program dan oleh karena itu mempersulit penempatan mereka di salah satu sektor ekonomi.

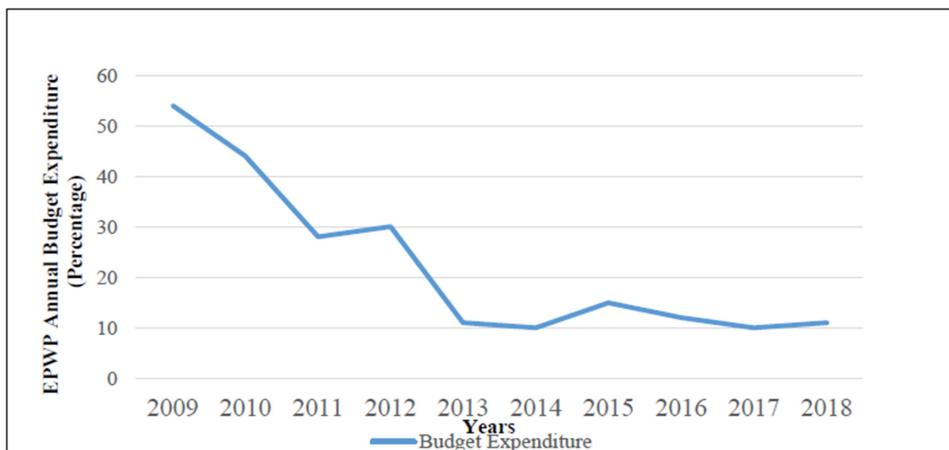
3.5 EPWP menyebabkan perpindahan atau pergantian pekerja penuh waktu

Pekerja EPWP telah menjadi pekerja murah di beberapa lembaga pemerintah, dalam proses menggusur atau mengganti pekerja penuh waktu. Misalnya, Annelia, seorang perempuan berusia 33 tahun dari Desa Glenred, yang bekerja di proyek EPWP membantu di sekolah setempat sebagai resepsionis dan juga bertanggung jawab untuk membersihkan ruang staf serta kantor kepala sekolah, menyatakan keprihatinannya tentang hal ini. Mereka mengatakan dia telah melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh staf penuh waktu selama sekitar dua tahun. Dia bekerja dengan tiga orang lainnya, dua perempuan dan satu laki-laki, yang semuanya masih muda. Annelia menghasilkan R780 per bulan dengan bekerja dua hari seminggu. Beberapa peserta EPWP di bagian lain negara telah beralih ke aksi industrial yang menuntut agar mereka dipekerjakan secara permanen di posisi tersebut. Sekitar 62% peserta EPWP dari data lapangan menunjukkan bahwa mereka mengerjakan proyek jangka pendek sementara 38% menunjukkan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh staf tetap. Beberapa perwakilan tenaga kerja telah menyerukan penghentian praktik eksploitatif yang menggunakan peserta EPWP ini dalam fungsi-fungsi pemerintah penyampaian layanan utama. Kepemimpinan politik juga menyerukan diakhirinya praktik ini oleh lembaga-lembaga pemerintah, dengan Majelis Nasional mengulangi hal ini menjelang akhir Fase Tiga (3) selama debat parlemen tentang EPWP. Beberapa perwakilan tenaga kerja telah menyerukan penghentian praktik eksploitatif yang menggunakan peserta EPWP ini dalam fungsi-fungsi pemerintah penyampaian layanan utama. Kepemimpinan politik juga menyerukan diakhirinya praktik ini oleh lembaga-lembaga pemerintah, dengan Majelis Nasional mengulangi hal ini menjelang akhir Fase Tiga (3) selama debat parlemen tentang EPWP. Beberapa perwakilan tenaga kerja telah menyerukan penghentian praktik eksploitatif yang menggunakan peserta EPWP ini dalam fungsi-fungsi pemerintah

penyampaian layanan utama. Kepemimpinan politik juga menyerukan diakhirinya praktik ini oleh lembaga-lembaga pemerintah, dengan Majelis Nasional mengulangi hal ini menjelang akhir Fase Tiga (3) selama debat parlemen tentang EPWP.

3.6 Struktur pendukung program EPWP lemah

Struktur pendukung EPWP rapuh karena sebagian besar bergantung pada pemerintah Auditor Jenderal Afrika Selatan. Pemerintah sangat dikritik karena gagal menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan kepada masyarakat yang telah mengalami peningkatan masalah pemberian layanan selama bertahun-tahun. Karena EPWP disampaikan melalui model ini, ia juga terjebak dalam perangkat masalah lama yang belum dapat diselesaikan pemerintah selama bertahun-tahun. Hal ini telah menjadi norma dalam pemerintahan di mana pemerintah daerah adalah pemboros terburuk di antara badan publik yang menerapkan EPWP, dengan laporan keuangan 2018/19 menunjukkan pengeluaran kurang dari 13% untuk anggaran kota dan hibah bersyarat. Ini didukung berdasarkan data EPWP tentang pengeluaran tahun 2008 hingga 2019 pada Gambar 1.4.

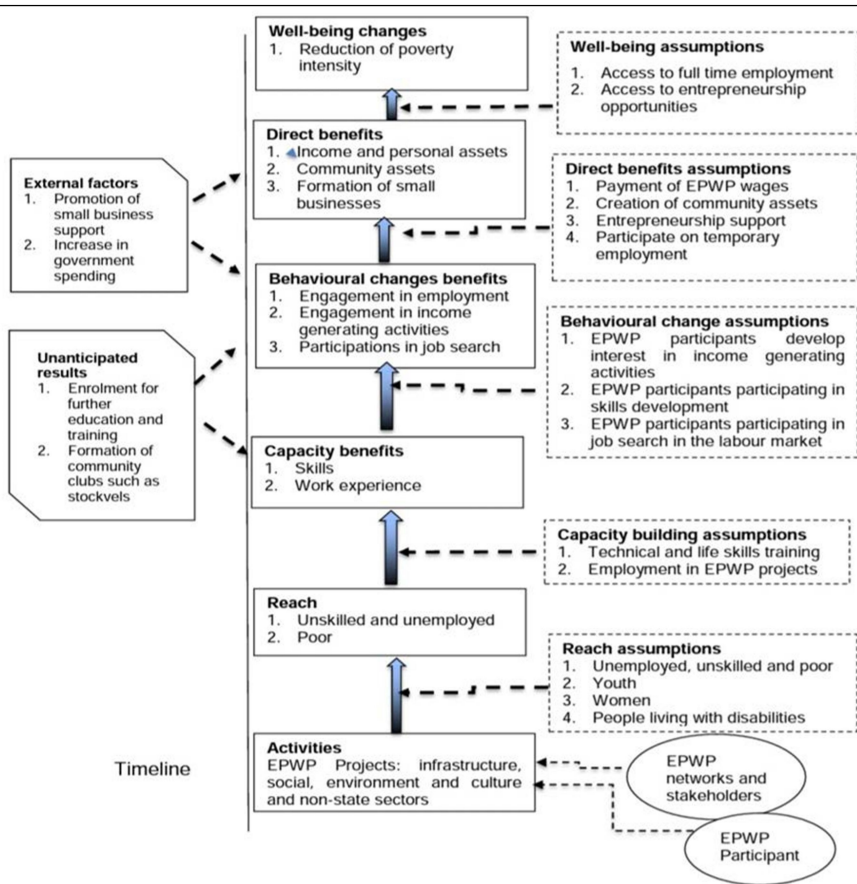


Gambar 1.4. Mengilustrasikan Pengeluaran Proyek EPWP

Gambar 1.4 mengilustrasikan pengeluaran proyek sebagaimana dilaporkan pada sistem pelaporan EPWP dari Fase Dua (2) hingga Fase Tiga (3). Sebagaimana diilustrasikan di atas, program hanya mampu menghabiskan lebih dari 50% sumber daya yang dialokasikan hanya sekali dalam 10 tahun pelaksanaan. Di 2009, ketika Sektor Non-Negara diperkenalkan, program ini berhasil menghabiskan 54% dari sumber daya yang dialokasikan. Sejak 2013, program ini secara konsisten membelanjakan kurang dari 20% sumber daya yang dialokasikan. Ini menekankan poin bahwa meskipun pendekatan Keynes terhadap intervensi pemerintah diperlukan, pemerintah saja tidak dapat secara efektif memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk perekonomian sehingga perlu melibatkan sektor swasta. Ada saran untuk memasukkan sektor swasta seperti yang diusulkan dalam kerangka awal program tahun 1992 yang belum terwujud. Sayangnya, program tersebut telah terjatuh dalam jaring kinerja buruk pemerintah yang telah dinormalisasi dalam struktur pemerintahan.

Artikel ini berfokus pada pengentasan tantangan jangka panjang melalui implementasi EPWP di studi fenomenologi dengan fokus lensa khusus pada kemampuannya untuk meredakan yang rentan (perempuan dan pemuda). Tetap penting untuk menanyakan apakah hasil yang diinginkan dari EPWP dimasukkan dalam desainnya. Karena kerumitan program dan tantangan yang dihadapi, memahami asumsi yang mendasari sangat penting untuk menjelaskan program ini. Ini juga memungkinkan seseorang untuk dapat menarik keterkaitan dalam ekosistem.

Gambar 1.5. Mengilustrasikan Asumsi Pemangku Kepentingan PPU EPWP.



Gambar 1.5. Ekosistemnya terdiri dari pemangku kepentingan yang menyediakan proyek dan panduan kebijakan dan peserta orang miskin dan tidak terampil yang mencari peluang kerja.

Model ini mengasumsikan bahwa program menjangkau penerima manfaat yang ditargetkan, sedangkan pada peserta program

menerima peningkatan kapasitas, juga mengasumsikan bahwa perubahan perilaku peserta dapat mencari kerja, partisipasi kewirausahaan dan pengembangan keterampilan secara aktif.

Dengan keikutsertaan pada peserta program dikatakan menerima manfaat langsung seperti pekerjaan sementara, upah, aset masyarakat dan dukungan kewirausahaan. Pada akhirnya terjadi perubahan kesejahteraan berupa penurunan intensitas kemiskinan. Ada beberapa hasil yang tidak terduga seperti pendaftaran ke pendidikan atau pelatihan lebih

lanjut dan partisipasi dalam klub tabungan. Asumsi ini membentuk model program program pemerintah memiliki pengangguran struktural yang mengakar, yang, pada dasarnya, berada di luar cakupan respons kebijakan atau program jangka pendek. Hal ini memerlukan penyatuan pendekatan sebagaimana diinformasikan oleh teori Keynesian yang mendukung intervensi pemerintah dan Neo-liberalisme yang mendukung pasar bebas. Jika hanya pendekatan Keynesian yang diadopsi, makalah ini menolak anggapan bahwa EPWP harus memanfaatkan kemampuan jangka pendeknya yang diambil dari pendekatan PEP atau PWP standar untuk mengatasi tantangan jangka panjang. Argumen ini sejalan dengan sejarah dalam temuan yang berpendapat bahwa kebijakan harus dirancang untuk mengatasi sifat tantangan jangka panjang. Dua masalah utama membuat kasus unik; pertama, pengangguran di negara ini bersifat struktural, membuat tantangan yang sulit diselesaikan dari pendekatan neoliberal seperti meningkatkan ekonomi saja dan mengharapkan pasar untuk menyerap pengangguran. Kedua, pengangguran lebih memengaruhi perempuan dan kaum muda daripada laki-laki, yang pada dasarnya berarti bahwa pendekatannya harus unik dan berorientasi pada penanganan dua aspek penting ini norma biasa intervensi pemerintah jangka pendek saja.

4. KESIMPULAN

Pembahasan dalam temuan di atas menyoroti bahwa EPWP terlalu luas sehingga dampaknya terutama terhadap pengangguran perempuan dan kaum muda menjadi tidak signifikan. Masalah yang diangkat dalam pengumpulan data mengharuskan perlunya program didesain ulang. Dalam bentuknya yang sekarang, kontribusinya sangat minim. Pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam hal ini termasuk apakah program harus mengalihkan fokusnya dari penanggulangan krisis jangka pendek ke penyediaan peluang jangka panjang dengan mengakui karakteristik pengangguran struktural dan jangka panjang. Pilihan kedua adalah merancang dirinya sendiri sebagai pemberi kerja pilihan

terakhir. Pada tahap pertama, program akan berfokus pada kualitas pekerjaan yang berarti pengembangan keterampilan dan pengalaman kerja akan menjadi kunci dalam desain program. Contoh kedua, program ini akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan tidak terampil yang tidak dapat diserap oleh tenaga kerja, dengan fokus pada kuantitas pekerjaan. EPWP merupakan program kembar yang memberikan perlindungan sosial dan kesempatan kerja. Mencoba untuk mengejar keduanya membuat program ini kewalahan, membuatnya hanya tergores di permukaan tanpa banyak yang bisa ditampilkan. Namun, tantangan kemiskinan dan pengangguran di negara ini sangat mendesak. Ini berarti jika program kembar ingin berhasil, program itu perlu didesain ulang. Oleh karena itu, mendesain ulang berarti program tersebut harus memisahkan keharusan perlindungan sosialnya dari penciptaan kesempatan kerja. Menggabungkan kedua kelompok tersebut membuat pendatang baru di pasar tenaga kerja atau kaum muda tidak mendapatkan pekerjaan penuh waktu di masa depan.

Oleh karena itu, hal ini mengarah pada diskusi tentang apa yang dapat dilakukan oleh program secara berbeda untuk dapat (1) memberikan perlindungan bagi kaum miskin dan (2) memfasilitasi transisi perempuan dan pemuda ke pekerjaan penuh waktu. Dalam merancang program, penting untuk mempertimbangkan bahwa negara sedang duduk di atas 'bom waktu' karena pengangguran perempuan dan pemuda yang membuat segala upaya untuk mengatasinya menjadi mendesak. Orang-orang yang menjadi target program memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kaum muda dan orang yang aktif secara ekonomi membutuhkan keterampilan atau pengalaman kerja untuk bergabung kembali dengan pasar tenaga kerja. Ada kelompok lain yang perlu dilindungi dari kemiskinan. Kebutuhan yang berbeda ini harus dipertimbangkan dalam rancangan program.

Dalam mendesain ulang program, prosesnya harus menjawab tiga (3) pertanyaan sebagai berikut:

- a) Siapa – program harus memisahkan peserta EPWP sesuai dengan kebutuhannya (mereka yang membutuhkan perlindungan dari kemiskinan atau tidak terampil yang aktif secara ekonomi).
- b) Apa – perlindungan sosial atau penciptaan kesempatan kerja. Dalam hal ini, peserta EPWP harus diklasifikasi menurut kebutuhan, baik dalam perlindungan sosial maupun dalam penciptaan lapangan kerja.
- c) Bagaimana – ini adalah bagian pelaksanaan program, yang akan dipandu oleh klasifikasi peserta EPWP. Perpaduan pemangku kepentingan dan tawaran program sedemikian rupa sehingga mendukung transisi ke pekerjaan atau perlindungan sosial.
- d) Mengapakah - Ini berarti paket untuk pencari kerja harus berbeda dari penerima perlindungan sosial. Sehubungan dengan yang pertama, makalah ini mengusulkan bahwa perempuan dan pemuda yang aktif secara ekonomi tidak terampil atau semi-terampil menjadi sasaran program ini.

Dalam kasus nanti tujuannya adalah untuk memberikan bantalan kepada orang miskin. Kemitraan publik-swasta, pengembangan keterampilan, jenis kegiatan diperlukan untuk memfasilitasi transisi ke pekerjaan penuh waktu sehingga ekonomi tidak terjebak pada program tanpa jalan keluar. Program perlu memperluas jumlah kesempatan kerja untuk memenuhi sejumlah besar yang membutuhkan perlindungan sosial. Saat mengerjakan program, peserta perlu diajari keterampilan hidup atau dihubungkan dengan entitas yang mendukung inisiatif tersebut. Kebijakan perlu mempertimbangkan keunikan tantangan dapat digunakan dalam mengatasi tantangan tersebut.

REFERENSI

- Dankan Gowda, V., Swetha, K. R., Namitha, A. R., Manu, Y. M., Rashmi, G. R., & Chinamuttevi, V. S. (2022). IOT Based Smart Health Care System to Monitor Covid-19 Patients. *International Journal of Electrical and Electronics Research*, 10(1), 36–40.
<https://doi.org/10.37391/IJEER.100105>
- Erozkan, A. (2013). The effect of communication skills and interpersonal problem solving skills on social self-efficacy. *Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri*, 13(2), 739–745.

- Lee, H., Lee, S., Ko, J., & Bang, H. (2021). Investigating the Effects of Course Satisfaction and Career Decision-Making Efficacy on Intrinsic Motivation of Undergraduates in Beauty Health Major. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 21(3), 147–157.
<https://doi.org/10.12738/jestp.2021.3.011>
- PARKS, M. R. (1977). Relational Communication: Theory and Research. In *Human Communication Research* (Vol. 3, Issue 4). <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1977.tb00541.x>
- Pogorzelski, J. (2018). Emotional Branding. In *Managing Brands in 4D*.
<https://doi.org/10.1108/978-1-78756-102-120181004>
- Rahardjo, P. T., & Si, M. (n.d.). *Frekuensi Identitas Komunikasi Bisnis dan Pemasaran ; Peluang Identitas Dikumpulkan Media Sosial Menggunakan “ Post- Quantitative ” Frequency of Identity in Business Communication and Marketing ; Identity Collected Social Media Opportunity Using “ Post- Q. 1–15.*
- Th, H. Y., Trinova, Z., Andiyan, A., & Faletahan, U. (2022). *The Effects of the Covid-19 Pandemic on Student Learning , Social Interaction , The Effects of the Covid-19 Pandemic on Student Learning , Social Interaction , and Health. May.*
- Thapliyal, N., & Dimri, P. (2022). Load Balancing in Cloud Computing Based on Honey Bee Foraging Behavior and Load Balance Min-Min Scheduling Algorithm. *International Journal of Electrical and Electronics Research*, 10(1), 01–06. <https://doi.org/10.37391/IJEER.100101>
- Trent, N. (2009). Branding your medical practice with effective public relations. *The Journal of Medical Practice Management : MPM*, 25(3), 183–185.